

SYAIR ASIMAN\*

## PESANTREN AL-KHAIRIYAH : SEBUAH PEMBELAAN YANG TERKATUNG-KATUNG

Tulisan M.A. Tihami yang dimuat di majalah al-qalam No. 31/VII/1991, berjudul *Perguruan Islam (Pesantren) Al-Khairiyah* ternyata menarik penulis, paling tidak karena penulisnya sendiri adalah alumni (Pesantren) Al-Khairiyah.

Dalam tulisan tersebut, Tihami antara lain menuliskan sebagai berikut:

Pada tahun 1851 (mungkin 1951 - pen.), Jam'iyah Nahdlotus Subbanil Muslimin yang mengelola langsung Pesantren/madrasah Al-Khairiyah di Pusat dan di cabang-cabang, mengadakan rapat pleno pengurus. Dari hasil rapat tersebut diperoleh keputusan merubah Jam'iyah Nahdlotus Syubbanil Muslimin menjadi "PERGURUAN ISLAM AL-KHAIRIYAH" yang berpusat di Citangkil (Cilegon) dengan ketuanya ustadz Masria.

Selanjutnya Tihami menulis: ... sejak dari Jam'iyah Nahdlotus Syubbanil Muslimin sampai terbentuknya perguruan Islam Al-Khairiyah, organisasi ini belum mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga oleh karena kegiatannya lebih banyak menekankan pada kegiatan pendidikan/pengajaran yang tidak banyak memerlukan kelengkapan

organisasi. Demikian pula cabang-cabang, yang dalam hal ini madrasah-madrasah; masih menggunakan nama-nama yang berbeda-beda, misalnya Darussalam, Raudlatul Athfal, Al-Athfaliyah dan lain-lain, meskipun secara organisatoris mempunyai hubungan langsung dengan madrasah pusat Al-Khairiyah di Citangkil.

Bila ditelusuri, dalam penulisan tersebut ada kesan kekurangan data. Sebetulnya, Jam'iyah Nahdlotus Syubbanil Muslimin sejak tanggal 4 Safar 1350H/21 Juni 1931 M. pesantren ini telah mempunyai AD/ART, yang disebut *Statuten en Huishoudelijk Reglement*. Dasar ini dipakai oleh pengurus sebagai titik tolak seluruh kegiatan organisasi (Suchaeruddin Muslim, 1992:9). Barulah pada Mu'tamar pertama Al-Khairiyah, tahun 1955, AD/ART yang lebih lengkap ditetapkan. Dalam Mu'tamar itu pula ditetapkan, Ustadz M. Syadeli Hasan sebagai ketua umum PB. Al-Khairiyah.

Kekeliruan lain adalah ketika M.A. Tihami beranggapan bahwa walaupun beberapa madrasah yang dicatatnya tersebut mempunyai nama

\* Penulis adalah Pengurus Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) se-Indonesia, dan redaktur majalah SIGMA Fak. Syari'ah IAIN "SGD" di Serang.

yang berbeda-beda, namun secara organisatoris *mempunyai hubungan langsung* dengan madrasah pusat Al-Khairiyah di Citangkil. Ungkapan "mempunyai hubungan langsung" itu perlu dikoreksi. Mungkin yang dimaksud adalah mempunyai *ikatan batin*, dan bukan hubungan langsung. Sekilas kedua ungkapan tersebut mempunyai makna yang sama, tapi tidak demikian kenyataannya. Kata *mempunyai hubungan langsung*, mengandung konsekuensi bagi pelanggar segala ketentuannya. Sedangkan kata *mempunyai hubungan batin* tidak mempunyai dampak apapun bagi pelanggarnya.

Dikatakan mempunyai hubungan batin, sebab memang pegasuh-pegasuh madrasah tersebut, tak lain, adalah alumni Al-Khairiyah. Tapi secara organisatoris madrasah-madrasah tersebut tidaklah terikat dengan segala peraturan dan permainan Al-Khairiyah pusat. Dan meskipun dalam mu'tamar Al-Khairiyah tahun 1955, antara lain memutuskan penyeragaman nama-nama madrasah untuk bergabung dalam satu wadah Al-Khairiyah, adalah usaha awal untuk menyatukan misi dan visi alumni. Jadi tekannya adalah alumninya, bukan madrasahinya. Maka tidak heran bila hingga saat ini, para alumni yang terlanjur memberi nama bukan al-khairiyah pada madrasahinya tidak menggantinya dengan nama al-khairiyah.

Selanjutnya, M.A. Tihami me-

nyatakan bahwa adanya muktamar pada organisasi al-khairiyah, dari tahun ke tahunnya, dilatarbelakangi oleh kemelut dalam tubuh organisasi tersebut. Artinya, menurut Tihami, muktamar bagi al-khairiyah adalah forum terahir untuk memecahkan kemelut intern (lihat hal. 11, alinea ke 2). Jadi menurut M.A. Tihami, kongres al-khairiyah bukanlah aktivitas terencana. Ia ada karena kebutuhan mendesak, sama dengan tombol-tombol darurat.

Sehubungan dengan wafatnya K.H.M. Syadeli Hasan (Ketua PB), Tihami menyebutnya sebagai "periode perpecahan yang berlarut-larut". Kekhilafan para ulama Al-Khairiyah, oleh Tihami dianggap sebagai disharmonisasi di kalangan ulama Al-Khairiyah. Akibat dari disharmonisasi tersebut adalah menurunnya kuantitas dan kualitas santri secara drastis. Menurut hemat penulis ungkapan tersebut sangat berlebihan., "Mikul duwur mendem jero", tulis Suchaeruddin Muslim (1992:21).

Penulis pikir, di dalam organisasi, apalagi timbulnya konflik adalah sesuatu yang wajar. Menurut Suharsimi Arikonto (1990:233) terjadinya konflik adalah karena seseorang merasa terancam dari orang lain, dan ia mempertahankan sekuat tenaga kepentingan (prinsipnya). Organisasi dimana berkumpulnya banyak orang dengan berbagai karakter, tidaklah aneh bila dalam situasi tersebut timbul perbedaan-perbedaan kepentingan.

Konflik dalam suatu organisasi, hemat penulis, tidak melulu negatif. Stephen Robbins, seorang positifisme, adalah juga yang berpandangan serupa. Timbulnya konflik, kata Robbin, akan melahirkan manusia-manusia unggul, yaitu kelompok pemikir (group Think).

Lebih jauh Robbin memaparkan dalam hasil penelitiannya, bahwa para manager dari tingkat atas dan menengah, menganggap konflik sejajar nilainya dengan perencanaan, komunikasi motivasi dan pengambilan keputusan (ibid : 234-235). Dengan demikian, menurut para manager tersebut, konflik ternyata sangat penting bagi kemajuan dan kedinamisan suatu organisasi. Tanpa konflik, demokrasi di tubuh organisasi tersebut berarti sedang sakit keras.

Yang terjadi dalam tubuh Al-Khairiyah hanyalah konflik model birokrasi (Bureaucratic model), yakni selisih prinsip antara atasan dan bawahan (konflik dalam dimensi vertikal atau konflik hirarki). Kejadian ini pernah dialami oleh organisasi paling stabil sekalipun (lihat tragedi Golker, PPP dan PDI). Maka Al-Khairiyah, yang oleh Marwan Saridjo dkk. (1979:37) dikategorikan sebagai salah satu pesantren tertua di Indonesia, bukanlah sesuatu yang aneh bila pernah mengalami konflik. Dengan demikian, patut dipertanyakan, jika ada anggapan bahwa konflik/khilaf ulama Al-Khairiyah tersebut sebagai bencana, apalagi disebut "periode per-

pecahan yang berlarut-larut".

### **Al-Khairiyah Kini: Harapan dan Kenyataan**

Di penghujung bulan Desember 1992, pemuda Al-Khairiyah se-Indonesia berkumpul untuk pertama kalinya dalam sejarah percaturan pendidikan Al-Khairiyah untuk menyelenggarakan simposium dan musyawarah. Salah satu hasilnya ialah terbentuknya Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) se-Indonesia dengan H. Mufrodi Muhsin terpilih sebagai ketua umumnya untuk periode 1992 - 1995. Beberapa nama besar terpampang sebagai pelindung organisasi ini, misalnya, Dr. Atho Mudzhar, Mukhtar Zarkasyi, S.H., Prof. K.H.A. Wahab Afif, M.A., K.H. Fathullah Syam'un dan lain-lain.

Banyak harapan tertumpah pada organisasi ini, dari mutu pendidikan hingga masalah menurunnya rasa idealisme ke-Al-Khairiyah-an pada warga Perguruan Islam yang dicatat oleh L. Stoddard dalam buku *The new World of Islam* sebagai pelopor modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Bagi Himpunan Pemuda Al-Khairiyah, hal tersebut merupakan proyek besar sekaligus mulia. Besar, karena diusianya yang masih muda, HPA telah dihadapkan secara langsung pada persoalan-persoalan ummat, yang oleh Perguruan Islam Al-Khairiyah sendiri dianggap berat dan *ngejelimet*. Sedangkan dianggap mulia, karena kehadiran HPA ternyata memang sa-

ngat tepat, sehingga langsung disambut suka cita oleh warganya.

Ada dua masalah besar yang saat ini dihadapi oleh Perguruan Islam Al-Khairiyah. Pertama, belum tersedianya sarana informasi yang dimiliki oleh Al-Khairiyah. Akibatnya publikasi tentang Perguruan Islam yang cabang-cabangnya telah tersebar di seluruh nusantara ini sangat tidak seimbang dengan perkembangan zaman. Sarana informasi tersebut juga berguna sebagai kontrol terhadap perkembangan dan pengembangan cabang-cabang Al-Khairiyah yang berjauhan jarak, di samping sebagai perekat tali silaturahmi antar warga Al-Khairiyah itu sendiri. Masalah kedua, kurangnya Pengurus Besar Al-Khairiyah melakukan koordinasi ke daerah-daerah (cabang-cabang). Bahkan disinyalir, PB. Al-Khairiyah sendiri sangat memungkinkan untuk tidak memiliki data yang akurat tentang keberadaan cabang-cabangnya. Untuk organisasi sebesar Al-Khairiyah, kedua masalah tersebut adalah "pekerjaan rumah" yang harus segera diselesaikan. Tentu yang menjadi kendala adalah sangat minimnya keuangan yang dimiliki oleh Al-Khairiyah.

Akhirnya, nesehat Halwany Michrob (1992:7) kepada warga Al-Khairiyah dalam ceramah di hadapan pemuda Al-Khairiyah pada musyawarah tersebut perlu direnungi. Ia menyarankan bahwa hendaknya pihak intern Al-Khairiyah perlu melakukan penataan ulang, evaluasi kritis dan bi-

jaksana serta membuka diri seluas-luasnya, dan menjelaskan kepada para alumni yang dapat dihubungi, untuk ikut *uwur*, *urun* dan *sembur* agar perguruan sandaran ummat ini secepatnya memasuki masa-masa kebangkitan kembali. Dengan kata lain, yang telah *tinggal landas* jangan lupa *landasan*. Sedangkan untuk ekspansi ke luar, para alumni Al-Khairiyah sangat diharapkan menyebar ke pelosok-pelosok yang masih kosong yang memerlukan spirit Islami Al-Khairiyah seperti yang telah dirintis dan digemakan oleh para pendahulunya. Harapan itu, semoga menjadi kenyataan.

#### DAFTAR BACAAN

- Michrob, Halwany, M.Sc., Drs.H.,  
 1992 *Korelasi Al-Khairiyah dengan Sejarah Perjuangan Pahlawan Geger Cilegon 1888*, makalah pada simposium pemuda Al-Khairiyah se-Indonesia di Serang.
- Muslim, Suchaeruddin, Drs. H.,  
 1992 *Peranan Al-Khairah Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa*, makalah simposium pemuda Al-Khairiyah se-Indonesia di Serang.
- Tihami, M.A., Drs.,  
 1991 "Perguruan Islam (pesantren) Al-Khairiyah", dalam *Al-Qalam* No.31/VII/1991, Fak. Syari'ah IAIN SGD Serang.
- Suharsimi Arikonto, Dr.,  
 1990 *Organisasi dan Administrasi: Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Seridjo, Merwan, Drs. dkk,  
 1979 *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Dharma Bhakti, Jakarta.